

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanah pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dinyatakan: untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Hal ini dilakukan Dalam rangka memahami penerapan sistem pengendalian intern, sehingga pihak kementerian/instansi pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif, memahami adanya potensi pemahaman yang berbeda dalam memahami konsep pengendalian intern antara manajemen, staf, internal auditor dan eksternal auditor.

Hal tersebut perlu diperhatikan karena Mendasarkan atas kerangka konseptual yang menjadi landasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perspektif pengendalian intern lebih diarahkan pada aspek akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sehingga dalam memahami penerapan sistem pengendalian intern di kementerian/instansi pemerintah asumsi dasarnya adalah pengendalian pengelolaan keuangan bukan pengendalian untuk mendapatkan jaminan kualitas produk/jasa.

Undang-undang di bidang keuangan negara juga membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif

sehingga untuk mewujudkan diperlukan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya.

PP 60 tahun 2008 adalah langkah konkrit untuk membentuk *built in control* artinya pengawasan *by system*. Siapapun pemegang amanah birokrasi pemerintahan, maka dengan sendirinya sistem yang akan melakukan pengawasan guna mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dalam arti sempit dan mencapai visi, misi dan tujuan bernegara dalam arti seluas-luasnya sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya. (Setya:2009)

Ketika internal *control system* yang dijabarkan dalam SPIP bekerja secara otomatis melakukan fungsi pengawasan, maka setiap insan birokrasi pemerintah suka tidak suka akan bekerja “*under control*”. Selanjutnya, apabila kondisi ini dipertahankan maka terciptalah internal control culture, artinya sistem pengendalian intern menjadi bagian dari budaya organisasi pemerintahan di Indonesia (Setya:2009)

Akan tetapi, Seringkali terjadinya berbagai kasus korupsi, penyelewengan keuangan negara, pemborosan anggaran, inefisiensi organisasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang buruk salah satu penyebab utamanya adalah Sistem Pengendalian Internal (Mahmudi:2011)

Keberhasilan dari Sistem Pengendalian Intern salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern telah dijalankan sebagaimana mestinya sehingga mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan baik yang disengaja maupun tidak (Ardeno:2012)

Dari Hasil pemeriksaan juga mengungkapkan bahwa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan yang diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD serta

badan-badan lainnya masih memerlukan peningkatan, diantaranya kualitas penyusunan laporan keuangan, efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan, kepatuhan terhadap perundang-undangan serta efektifitas sistem pengendalian internal (SPI), menjaga kekayaan dan catatan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mahmudi:2011).

Efektivitas Sistem Pengendalian Intern dibuktikan dengan penyajian informasi keuangan secara wajar dan cukup dalam laporan keuangan. Keberadaan suatu sistem pengendalian intern tidak menjamin adanya penyajian Laporan Keuangan secara wajar dan cukup. Jika suatu sistem pengendalian intern sangat lemah, masih dimungkinkan terjadinya suatu penyajian Laporan Keuangan secara wajar dan cukup.

Oleh sebab itu sebenarnya Pengendalian internal mempunyai peranan yang sangat penting dalam sebuah pemerintah akan tetapi peran dan fungsinya belum bisa dijalankan secara maksimalnya.

Padahal, seandainya pengendalian internal dapat dimaksimalkan maka akan memberikan mafaat yang sangat besar pada pemerintahan indonesia. Karena apabila Sistem Pengendalian Internal dijalankan dengan baik tentunya akan membuat pemerintah memperoleh opini WTP.

Dalam Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK Tahun 2010) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman antara lain masih terdapat kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 5 kasus yang mana terdapat 4 kasus terdapat Kelemahan Sistem Pengendalian Pelak sanaan anggaran Pendapatan dan Belanja.

Dimana dari tahun ketahun terdapat ketidak konsistenan jumlah temuan dari tahun 2008-2012 karena ada kalanya temuan itu bertambah dan ada pula yang berkurang (tahun

2008 ada 23 Temuan, tahun 2009 ada 33 Temuan, tahun 2010 ada 21 Temuan, tahun 2011 ada 29 Temuan, tahun 2012 ada 13 Temuan.

Selain itu berdasarkan situs bakin news terdapat berbagai kasus yang diakibatkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal yang dilakukan pada pemerintah daerah kota pariaman, seperti pengaspalan jalan yang tidak sesuai dengan kontrak, Laporan Fiktif Proyek Normalisasi Batang Manggung, Rehab SDN 03 Pauh Pariaman Terindikasi Tak Sesuai Spek dan beberapa kasus lagi yang terjadi karena sistem pengendalian internal yang lemah.

Berdasarkan latar belakang ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Kota Pariaman. Motivasi penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintah sehingga pada masa yang akan memperbaiki Kelemahan-kelemahan yang dimiliki dalam menjalankan Sistem Pengendalian Internnya. Penelitian tersebut akan dituangkan dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Kota Pariaman**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut masalah yang dapat diidentifikasi dan dirumuskan adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Pemerintah Kota Pariaman?
2. Apakah pelaksanaan SPIP di Pemerintah Kota Pariaman sesuai dengan PP 60 tahun 2008 tentang SPIP?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Mengevaluasi penerapan SPIP dalam menerapkan unsur-unsur yang ada terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Menganalisa dan menjelaskan perbedaan pelaksanaan SPIP pada pemerintahan daerah Kota Pariaman dalam pengelolaan keuangan daerah dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penulis tentang Sistem Pengendalian internal
2. Memberikan kontribusi bagi Pemerintah.
3. Memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan dalam kaitannya yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian internal.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk penulisan proposal penelitian ini yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pada Pemerintah Kota Pariaman”, terdiri dari 3 Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan



BAB II TINJAUAN LITERATUS, pada bab ini berisi teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan dari masalah yang akan diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi, desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan metode pengumpulan data, metode analisis data, indikator variabel penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan atau evaluasi penerapan SPIP dalam pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana penerapan oleh pemerintah kota pariaman dengan kriteria yang sesuai dengan PP 60 Tahun 2008.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan akhir dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi kemungkinan pengembangan penelitian lanjutan agar penerapan PP 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik dan benar.

